



**PENGADILAN NEGERI
PELALAWAN KELAS IB**

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



0852 72 008 008



Pengadilan Negeri
pelalawan Kelas IB



pn-pelalawan.go.id



info@pn-pelalawan.go.id



[pnpelalawan](https://www.instagram.com/pnpelalawan)



Pengadilan Negeri
pelalawan Kelas IB

**REVISI PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB**



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR: 384 /KPN.W4-U8/RA1.10/XI/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. ANDRY SIMBOLON, SH, MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Kerinci, 4 November 2025

**Pihak Kedua,
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU**

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H
NIP. 19610402 198203 2 003

**Pihak Pertama,
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**

Dr. ANDRY SIMBOLON, SH, MH
NIP. 19810720 200312 1 002

**PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TARGET		TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	14%
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98

	publik			
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 213.975.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.762.506.000,-

Pangkalan Kerinci, 4 November 2025

Pihak Kedua,
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU


Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 19610402 198203 2 003

Pihak Pertama,
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN


Dr. ANDRY SIMBOLON, SH, MH
NIP. 19810720 200312 1 002